

LAPORAN
STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR
TAHUN 2008



DITERBITKAN : DESEMBER 2008

DATA : OKTOBER 2007-OKTOBER 2008



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
KANTOR PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH
(K A N P E D A L D A)

Jalan Prof. A. Madjid Ibrahim – Kota Jantho, Telp./Fax. 0651 - 92054

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur ke hadirat Allah SWT, karena dengan rahmad-Nya Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah ini dapat tersusun. Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah pada dasarnya disusun untuk memberikan gambaran tentang kondisi lingkungan hidup daerah Kabupaten Aceh Besar secara menyeluruh.

Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah ini dimaksudkan untuk menyajikan informasi kondisi lingkungan hidup dari beberapa aspek kehidupan, diantaranya aspek sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya buatan serta bahan pencemar yang perlu diwaspadai dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. Selain itu dapat pula menjadi masukan dari berbagai pihak terkait khususnya dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan yang berwawasan lingkungan.

Mengingat luasnya cakupan data dan informasi yang berkaitan dengan kualitas lingkungan hidup, maka disadari bahwa penyusunan laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Aceh Besar 2008 masih jauh dari sempurna. Untuk itu saran dan masukan dari semua pihak guna peningkatan kualitas laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Aceh Besar di masa mendatang senantiasa kami harapkan.

Terima kasih yang sebesar-besarnya juga kami ucapkan kepada seluruh anggota Tim Penyusun serta semua pihak yang telah turut berpartisipasi menyusun dan mengembangkan kualitas laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Aceh Besar 2008 ini. Semoga niat mulia kita semua dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup senantiasa mendapat petunjuk dari Allah SWT.

Kota Jantho, Desember 2008
Kepala Kantor PEDALDA
Kabupaten Aceh Besar

Drs. H. Marzuki Yahya, MM
Pembina Tk. I
Nip. 010 088 319

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR LAMPIRAN	iv
ABSTRAK	1
BAB I PENDAHULUAN	3
1.1 Tujuan Penulisan Laporan	3
1.2 Visi dan Misi Kabupaten Aceh Besar	3
1.3 Gambaran Umum	4
BAB II ISU LINGKUNGAN HIDUP UTAMA	6
2.1 Kerusakan Lingkungan akibat Penambangan Bahan Galian Golongan C	6
2.2 Kerusakan Kawasan Pesisir dan Laut	7
2.3 Kerusakan Hutan akibat <i>Illegal Logging</i>	8
2.4 Peningkatan Volume Sampah	9
BAB III AIR	10
BAB IV LAHAN DAN HUTAN	19
4.1 Lahan	19
4.2 Hutan	19
BAB V REKOMENDASI	22
SUMBER DATA	23
DAFTAR PUSTAKA	24
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Lokasi Sampling Pemantauan Kualitas Air	12
Tabel 3.2	Hasil Uji Kualitas Air Sungai pada Musim Kemarau	13
Tabel 3.3	Hasil Uji Kualitas Air Sungai pada Musim Penghujan	14
Tabel 3.4	Kerangka <i>Pressure, State, Response</i> (PSR) untu permasalahan DAS Krueng Aceh	18
Tabel 4.1	Kerangka PSR Pemantauan Lahan dan Huta Kabupaten Aceh Besar	21

PDF Create! 2 Trial
www.scansoft.com

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Data Fisik Puskesmas Tahun 2008	25
Lampiran 2	Sumber Air	27
Lampiran 3	Sumber Daya Pesisir dan Laut	28
Lampiran 4	Sumber Daya Hutan dan Lahan	29
Lampiran 5	Data Curah Hujan Kabupaten Aceh Besar dan Sekitarnya Tahun 2007-2008	31
Lampiran 6	Peta Administrasi Kabupaten Aceh Besar	32
Lampiran 7	Peta Penutupan Lahan Kabupaten Aceh Besar	33
Lampiran 8	Foto-Foto Kerusakan Daerah Aliran Sungai	34
Lampiran 9	Foto-Foto Pemantauan Kualitas Air	37
Lampiran 10	Foto-Foto Kerusakan Pesisir	41

ABSTRAK



Aceh Besar adalah salah satu Kabupaten di Nanggroe Aceh Darussalam yang disahkan dalam Undang – undang Nomor 7 Tahun 1956 yang memiliki jumlah penduduk sekitar 300.000 jiwa, dan luas daerah 2.974,12 Km² terletak di 5,2⁰ - 5,8⁰ Lintang Utara dan 95,0⁰ - 95,8⁰ Bujur Timur, berbatasan langsung dengan :

- Sebelah Utara : Selat Malaka dan Kota Malaka Banda Aceh
- Sebelah Selatan : Kabupaten Aceh Jaya
- Sebelah Timur : Kabupaten Pidie
- Sebelah Barat : Samudera Hindia

Kabupaten Aceh Besar beribukotanya di Kota Johantha berdasarkan PP RI No. 35 Tahun 1976 dan diresmikan sebagai kota pada tanggal 3 Mei 1984 oleh Menteri Dalam Negeri. Kabupaten Aceh Besar memiliki 23 Kecamatan, 68 Kemukiman, 05 kelurahan dan 599 Desa/Gampong yang didalamnya mencakup cagar alam seluas 16.640 Ha, Taman Hutan Raya sebesar 6.030 Ha, Hutan Lindung sebesar 60.944 Ha, kebun Plasma sebesar 1.300 Ha. Sedangkan Hutan Rakyat (IPK-TM) sebesar 8,77 Ha dengan produksi 857,94 m³ pertahunnya.

Selanjutnya di Kabupaten Aceh Besar terdapat sarana transportasi udara, laut dan darat. Adapun sarana tersebut adalah satu buah Bandar Udara yang sedang dikembangkan menjadi Bandar Udara Internasional yaitu Bandar Udara Sultan Iskandar Muda dan satu buah pelabuhan Laut Malahayati di Desa Lamreh Kecamatan Masjid raya dan Jalan negara sepanjang 169,80 Km, jalan Propinsi Sepanjang 111,17 Km dan jalan kabupaten sepanjang 934,50 Km.

Di Kabupaten Aceh Besar juga terdapat beberapa buah sungai yang umumnya bermuara ke sungai Krueng Aceh kecuali sungai Krueng Raba di Kecamatan Lhok Nga

dan sungai Krueng Sarah di Kecamatan Leupung namun sungai yang dominan digunakan untuk Sumber PDAM dan irigasi teknis adalah sungai Krueng Aceh yang memiliki potensi air 602.337.600 meter kubik per tahun, panjang 130 km dan luas DPS mencapai 2.595,60 km persegi.

Kabupaten Aceh Besar juga memiliki potensi sumber daya air lainnya selain sungai. Diantaranya adalah mata air yaitu Mata Ie Nebit dengan debit air $\pm 8.000 \text{ m}^3/\text{detik}$, Japakeh dengan debit $\pm 48.000 \text{ m}^3/\text{detik}$ dan mata air Empe Bling dengan debit $\pm 15.000 \text{ m}^3/\text{detik}$. Selain mata air, di Kabupaten Aceh Besar juga terdapat beberapa waduk yaitu Waduk Blangkaram seluas 10 Ha dengan volume 250.000 m^3 , Waduk Krueng Lubuk seluas 6 Ha dengan volume 105.000 m^3 dan Waduk Keuning seluas 65 Ha dengan volume 975.000 m^3 .

Bencana Gempa dan Tsunami yang terjadi pada tanggal 26 Desember 2004 telah memporak-porandakan sebagian besar Kabupaten Aceh Besar yang berakibat langsung terhadap kelangsungan ekosistem lingkungan hidup, sosio kultural, perekonomian dan kegiatan – kegiatan masyarakat lainnya sehingga perlu kerja keras semua pihak untuk membangun kembali semua hal-hal tersebut diatas.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Tujuan Penulisan Laporan

Tujuan dari Penulisan Laporan status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Aceh Besar adalah sebagai berikut :

- a. Menyediakan informasi lingkungan hidup daerah kepada *stake holder*.
- b. Sebagai salah satu masukan bagi perencana pembangunan daerah untuk menunjang pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup.
- c. Sebagai penilaian penyelenggaraan Tata Praja Lingkungan Hidup (*Good Environmental Governance*).
- d. Untuk keterpaduan program pengelolaan lingkungan hidup antara pemerintah pusat, provinsi Nanggroe Aceh darussalam dan kabupaten Aceh Besar.

1.2 Visi dan Misi Kabupaten Aceh Besar

Visi dan misi Kabupaten Aceh Besar berlandaskan pada akar budaya, situasi dan kondisi ekonomi, serta memberikan gambaran tentang tujuan dan sasaran yang ingin dicapai di masa yang akan datang oleh masyarakat Kabupaten Aceh Besar.

1. Visi

Visi Kabupaten Aceh Besar adalah “*Terwujudnya masyarakat Aceh Besar yang damai, maju dan makmur dalam syariat Islam.*”

2. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi utama Kabupaten Aceh Besar adalah :

- a. Meningkatkan pelaksanaan Syariat Islam
- b. Mengembangkan dan meningkatkan sumber daya manusia
- c. Meningkatkan pembangunan ekonomi rakyat
- d. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*Good Governance and Clean Government*)
- e. Mempercepat pembangunan kawasan pesisir dan terisolir
- f. Mendorong percepatan proses rehabilitasi dan rekonstruksi
- g. Memelihara perdamaian

1.3 Gambaran Umum

Kabupaten Aceh Besar terletak di ujung barat daya Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan merupakan titik awal dari Banda Aceh menuju daerah Aceh dan Sumatera lainnya. Kabupaten Aceh Besar berbatasan dengan Selat Malaka dan Kotamadya Banda Aceh di sebelah utara, di sebelah selatan dengan Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Pidie di sebelah timur dan Samudera Hindia di sebelah barat.

Kabupaten Aceh Besar memiliki 23 Kecamatan, 68 Kemukiman, 5 kelurahan dan 599 Desa/Gampong. Kabupaten Aceh Besar juga mempunyai wilayah kepulauan yaitu kecamatan Pulo Aceh yang pulau-pulau utamanya adalah Pulo Breh (Pulau Beras) dan Pulo Peunaso (Pulau Nasi).

Sarana transportasi yang terdapat di Kabupaten ini adalah satu buah Bandar Udara yang telah dikembangkan menjadi Bandar Udara Internasional yaitu Bandar Udara Sultan Iskandar Muda di Kecamatan Blang Bintang dengan jarak dari Kota Jantho sebagai ibukota Kabupaten sekitar ± 50 Km. Satu buah pelabuhan Laut Malahayati di Desa Lamreh Kecamatan Masjid raya dengan jarak dari Kota Jantho sekitar ± 73 Km serta terminal Singgah Saree di Kecamatan Lambeh Seulawah yang mempunyai luas ± 2 Ha dengan jarak dari Kota Jantho ± 30 Km.

Di Kabupaten Aceh Besar juga terdapat beberapa buah sungai yang umumnya bermuara ke sungai Krueng, kecuali sungai Krueng Raba di Kecamatan Lhok Nga dan sungai Krueng Sahan di Kecamatan Leupung. namun sungai yang dominan digunakan untuk Sumber PD. M dan irigasi teknis adalah sungai Krueng Aceh yang memiliki potensi air 2.337.600 meter kubik per tahun, panjang 130 km dan luas DPS mencapai 2.595,60 km persegi.

Kabupaten Aceh Besar juga memiliki potensi sumber daya air lainnya selain sungai, diantaranya adalah mata air. Data dari Dinas Kimpraswil menyebutkan beberapa mata air di Kabupaten Aceh Besar yaitu Mata Ie Nebit dengan debit air ± 8.000 m³/detik, Japakeh dengan debit ± 48.000 m³/detik dan mata air Empe Bling dengan debit ± 15.000 m³/detik. Selain mata air, di Kabupaten Aceh Besar juga terdapat beberapa waduk yaitu Waduk Blangkaram seluas 10 Ha dengan volume 250.000 m³, Waduk Krueng Lubuk seluas 6 Ha dengan volume 105.000 m³ dan Waduk Keuliling seluas 65 Ha dengan volume 975.000 m³ (Lampiran 2).

Data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Besar menyebutkan fasilitas kesehatan di Aceh Besar terdiri dari satu buah Rumah Sakit yang terletak di Kota Jantho dan 25 buah Puskesmas yang terletak di berbagai kecamatan di Aceh Besar. Hal ini berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Besar (Lampiran 1).

Beberapa industri kecil dan menengah juga terdapat di Kabupaten Aceh Besar. Berdasarkan data dari Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) terdapat ± 16 industri rumah tangga kecil dan menengah. Diantaranya adalah industri Bordir, Industri Gula Kelapa, Industri Minyak Kelapa, Industri Pemintal Tali, Industri Sirup Manis, Bubuk Kopi, Kelapa Gongseng, Pakan Udang, Ternak dan Ikan, Industri Tas, Industri Es, dan Industri Kue.

PDF Create! 2 Trial
www.scansoft.com

BAB II

ISU LINGKUNGAN HIDUP UTAMA

Masalah Lingkungan Hidup yang dihadapi sekarang ini adalah masalah yang dipandang dari sudut kepentingan manusia, yang merupakan masalah ekologi manusia. Masalah ini timbul karena adanya perubahan daya dukung lingkungan sehingga menimbulkan ketimpangan dalam tata kehidupan yang mengganggu kesejahteraan manusia. Pengangkatan isu utama lingkungan hidup bertujuan untuk memfokuskan pembahasan pada hal-hal yang memiliki pengaruh besar bagi lingkungan di Kabupaten Aceh Besar.

Adapun isu-isu lingkungan hidup yang berkembang di Kabupaten Aceh Besar antara lain:

2.1 Kerusakan Lingkungan akibat Penambangan Bahan Galian Golongan C

Dengan melihat pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980, tentang Penggolongan Bahan Galian, bahwa bahan galian tambang dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu:

- Golongan Bahan Galian Strategis (A)
- Golongan Bahan Galian Vital (B)
- Golongan Bahan Galian Non Strategis dan Vital (C)

Bahan tambang / galian golongan C walaupun tidak termasuk bahan tambang yang vital maupun strategis, namun mempunyai peranan penting dalam pembangunan fisik terutama pasca Tsunami 26 Desember 2004 lalu. Rehab dan rekon di Kabupaten Aceh Besar memerlukan pasokan material galian C terutama pasir dan kerikil, andesit, dan tanah urug dalam skala yang sangat besar, sehingga eksploitasi bahan galian golongan C dilakukan secara besar-besaran dan tidak terkendali. Pengusaha-pengusaha tambang bahan galian golongan C ini berlokasi di daerah tepi sungai Krueng Aceh yang berdekatan dengan pemukiman penduduk. Selain mengancam keselamatan penduduk di sekitar penambangan juga mengancam kelestarian fungsi Daerah Aliran Sungai (DAS) Krueng Aceh.

Kondisi kerusakan lingkungan yang terjadi akibat dampak penambangan bahan galian golongan C sangat memprihatinkan. Kerusakan lingkungan tersebut diantaranya:

1. Semakin melebarnya tepi sungai yang dapat mengganggu daerah batas perkampungan dan merusak jalur transportasi.
2. Terjadinya perpindahan aliran air yang dapat mengakibatkan terhambatnya aliran air pada musim kemarau dan sebaliknya pada musim hujan, aliran air sangat deras menghantam bagian tepi sungai. Hal ini mengakibatkan melebarnya batas tepi sungai dan menyebabkan banyak titik longsor di sepanjang tepi sungai.

Selain penambangan di sekitar Krueng Aceh yang merusak DAS Krueng Aceh, juga terdapat penambangan tanah urug di darat dan batu bongkah dalam skala besar di perbukitan dengan menggunakan alat berat dan sebagian besar dilakukan secara liar/non SIPD, sehingga terjadi kerusakan bentang alam baik berupa penurunan mata air, erosi dan longoran serta kerusakan lingkungan lainnya. Saat ini terdapat sekitar 80 pertambangan Bahan Galian C yang memiliki izin di Kabupaten Aceh Besar.

2.2 Kerusakan Kawasan Pesisir dan Laut

Sebagian besar wilayah Indonesia berupa perairan laut yang letaknya sangat strategis. Wilayah pesisir merupakan suatu daerah peralihan (ecotone) antara daerah daratan dan laut, sedangkan wilayah lautan yaitu daerah tegak lurus terhadap garis pantai pada kondisi pasang laut terendah sejauh 12 mil laut (laut teretorial) hingga mencapai 200 mil laut (Zona Ekonomi Eksklusif). Perairan laut yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten sejauh 4 mil laut.

Kawasan pesisir pantai merupakan kawasan yang sangat dinamis dan sangat rentan terhadap pengaruh perubahan, baik perubahan cuaca maupun perubahan fisik yang terjadi di kawasan tersebut. Kegiatan yang terjadi di kawasan ini juga sangat beragam seperti pengembangan pelabuhan sebagai sarana perhubungan laut, pemukiman, industri, perikanan, pertambangan maupun pariwisata.

Wilayah pesisir juga memegang peranan penting bagi kehidupan manusia. Wilayah ini merupakan wilayah yang paling produktif yang dapat dijangkau oleh manusia. Namun wilayah ini sangat rentan terhadap gangguan baik dari alam maupun dari tangan manusia.

Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan menyebutkan ekosistem terumbu karang di Kabupaten Aceh Besar yaitu di Kecamatan Pulo Aceh seluas 1300 Ha,

Kecamatan Lhoknga 750 Ha, Kecamatan Leupung 557 Ha dan Kecamatan Lhoong 437 Ha. Sebagian besar terumbu karang ini hancur akibat pengeboman. Untuk itu perlu rehabilitasi kembali diantaranya dengan pembuatan terumbu karang buatan.

Kabupaten Aceh Besar memiliki hutan mangrove di Kecamatan Masjid Raya seluas 375 Ha, Kecamatan Baitussalam 227 Ha, Kecamatan Lhoong 60 Ha dan Kecamatan Pekan Bada 57 Ha (Lampiran 3). Tsunami pada 26 Desember 2004 telah merusak dan menghancurkan ribuan hektar pesisir termasuk tanaman pelindung pantai dan hutan mangrove serta ratusan hektar tambak masyarakat dan sarana melaut bagi nelayan yang membawa dampak terhadap perekonomian masyarakat pesisir pantai.

2.3 Kerusakan Hutan Akibat *Illegal Logging*

Sumber daya hutan merupakan salah satu kekayaan alam yang sangat besar kontribusinya bagi pembangunan. Pemanfaatan yang tidak disertai dengan pengelolaan yang baik menyebabkan sumber daya hutan rusak permanen.

Kerusakan hutan di Kabupaten Aceh Besar tergolong berat, antara lain terjadi pada kawasan hutan Lhoong di daerah Ceh Fancasila (Lam Sujen), di Kecamatan Jantho, Kecamatan Cot Glee (Siron), pemukiman Setlawah (Desa Panca), Taman Hutan Raya (Saree) dan Lamteuba, Kecamatan Seulimeum. Taman Hutan Industri (HTI) di Lamteuba ditebang untuk kayu bakar industri bata. Penebangan kayu secara illegal dan perambahan hutan untuk peledangan erat kaitannya dengan mata pencarian masyarakat sekitar kawasan hutan tersebut.

Berdasarkan data dari Dinas Kehutanan terdapat beberapa titik *Illegal Logging* di Kabupaten Aceh Besar yaitu di Lembah Seulawah, Seulimeum, Aneuk Gle, Kota Jantho, Indipuri, Lhoknga, Leupung dan Lhoong. Namun luas kerusakan akibat *Illegal Logging* ini belum dapat teridentifikasi.

Bagi masyarakat di sekitar pegunungan, penebangan hutan merupakan salah satu pekerjaan yang dapat memberikan keuntungan yang sangat menjanjikan. Oleh karena itu sangatlah sulit menghimbau masyarakat untuk sadar akan bahaya penebangan liar dan penggundulan hutan. Hal ini semakin diperparah dengan kebutuhan pasokan kayu untuk rehab dan rekon pasca Tsunami Desember 2004 lalu.

2.4 Peningkatan Volume Sampah

Kabupaten Aceh Besar mempunyai 1 (satu) sarana TPA Bukit Meusara dalam pengelolaan sampah dengan luas \pm 3600 m yang terletak di Desa Bukit Meusara Kecamatan Kota Jantho. TPA ini merupakan TPA bantuan UNDP yang mulai dioperasikan sejak bulan Maret 2007. TPA ini mengelola sampah ibukota kabupaten dan daerah sekitarnya.

Sedangkan untuk pengelolaan sampah pasar dan sampah masyarakat kecamatan yang berada di pinggiran Kota Banda Aceh (Kecamatan Darul Imarah dan Kecamatan Ingin Jaya) dan kecamatan yang berada di daerah pesisir pantai (Kecamatan Lhoknga dan Kecamatan Peukan Bada) masih dikelola oleh TPA Pimping Jawa. TPA ini mempunyai luas lahan 21 Ha dengan sisa lahan yang belum terpakai sebesar 9 Ha.

Secara umum pelayanan sampah belum terlayani secara maksimal. Hanya penanganan sampah pasar kecamatan saja yang sudah dapat terlayani. Namun tidak semua dari 23 kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Besar yang dapat terlayani. Pemerintah Kabupaten Aceh Besar telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan pola hidup bersih dan melakukan penanganan terhadap sampah, yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan kinerja pengelolaan sampah. Hal ini karena jika kepedulian masyarakat rendah dalam menjaga kebersihan lingkungan akan memicu terjadinya degradasi kualitas lingkungan.

BAB III

AIR

Air merupakan sumber daya alam yang memenuhi hajat hidup orang banyak sehingga perlu dilindungi agar dapat tetap bermanfaat bagi hidup dan kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya. Air sebagai komponen lingkungan hidup akan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh komponen lainnya. Air yang kualitas buruk akan mengakibatkan kondisi lingkungan hidup menjadi buruk yang akan mempengaruhi kondisi kesehatan dan keselamatan manusia serta kehidupan makhluk hidup lainnya. Penurunan kualitas air akan menurunkan daya guna, hasil guna, produktivitas, daya dukung dan daya tampung dari sumber daya air yang pada akhirnya akan menurunkan kekayaan sumber daya alam (*Natural Resources Depletion*).

Penggunaan air untuk berbagai manfaat dan kepentingan harus dilakukan secara bijaksana dengan memperhitungkan kepentingan generasi masa depan. Oleh karena itu air harus dikelola agar tersedia dalam jumlah yang aman, baik kualitas maupun kuantitasnya. Hal ini dimaksudkan agar air tetap berfungsi secara ekologis untuk menunjang pembangunan yang berkelanjutan.

Usaha atau kegiatan manusia memerlukan air yang berdaya guna, namun hal ini berpotensi menimbulkan dampak negatif salah satunya adalah pencemaran air. Agar air dapat bermanfaat secara lehari dan pembangunan dapat berkelanjutan, maka dalam pelaksanaan pembangunan perlu dilakukan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.

Berdasarkan definisinya, pencemaran air diindikasikan dengan menurunnya kualitas air sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sebagaimana peruntukannya. Baku mutu air yang ditetapkan dan berfungsi sebagai tolak ukur untuk menentukan terjadinya pencemaran air, juga merupakan arahan tentang tingkat kualitas air yang akan dicapai oleh setiap program kerja pengendalian pencemaran air.

Berdasarkan PP No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, klasifikasi mutu air ditetapkan menjadi 4 (empat) kelas, yaitu:

- a. Kelas satu, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air baku air minum,

dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.

- b. Kelas dua, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk prasarana / sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.
- c. Kelas tiga, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi tanaman dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.
- d. Kelas empat, air yang peruntukannya dapat digunakan mengairi pertanaman, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.

Salah satu sumber air terbesar di Kabupaten Aceh Besar adalah sungai yang juga memiliki fungsi yang sangat penting bagi umat manusia. Oleh karena itu sungai harus dijaga agar tetap dapat mendukung pembangunan ekonomi yang merupakan pilar utama pembangunan nasional. Kondisi lingkungan sungai sangat tergantung oleh alam dan perlakuan manusia. Perlakuan tersebut tergantung pada apresiasi dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan sungai. Oleh karena itu keselarasan hubungan antara manusia dan lingkungan sungai sangat menentukan upaya pelestarian fungsi lingkungan sungai.

DAS Krueng Aceh merupakan sumber air minum terbesar bagi masyarakat kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar. DAS Krueng Aceh juga digunakan sebagai sarana irigasi bagi daerah pertanian di sepanjang sungai. Oleh karena, untuk mempertahankan kualitas air Krueng Aceh harus dilakukan pemantauan secara terpadu dan komprehensif yang juga berfungsi untuk memberikan arahan kebijakan yang tepat bagi pemerintah daerah.

DAS Krueng Aceh memiliki luas $\pm 1776 \text{ Km}^2$ terletak di dalam Kabuapten Aceh Besar dan Kota Banda Aceh. Sub DAS besar yang termasuk dalam sistem sungai Krueng Aceh antara lain Krueng Inong, Krueng Keumire, Krueng Jreu yang bermuara ke sungai Krueng Aceh dan mengalir ke Selat Malaka melalui kota Banda Aceh. Kondisi topografi DAS Krueng Aceh adalah datar sampai bergelombang dengan kategori sedang. Kemiringan rata-rata berkisar antara 15% sampai 20%.

Bagian selatan DAS Krueng Aceh dibatasi oleh pegunungan tinggi dengan ketinggian ± 125 m sampai dengan ± 750 m di atas permukaan laut dengan kemiringan antara 30% sampai 65%. Bagian utara merupakan daerah yang agak berbukit (bergelombang) yang terletak pada ketinggian ± 25 m sampai 40 m di atas permukaan laut dengan kemiringan antara 10% sampai 15%, sebagian besar perbukitan tersebut adalah hutan. Sedangkan bagian barat merupakan dataran yang cukup luas yang merupakan pusat pemukiman penduduk dan perkotaan.

Perubahan pola pembangunan lahan di sekitar DAS Krueng Aceh khususnya deforestasi (pengurangan luas lahan) di hulu sungai Krueng Aceh menyebabkan meningkatnya koefisien limpasan, koefisien regim sungai dan erosi. Hal ini menyebabkan daya dukung dan daya tampung DAS Krueng Aceh semakin menurun. Untuk itu pemantauan terhadap air sungai Krueng Aceh sangat perlu dilakukan.

Pelaksanaan pemantauan terhadap air sungai Krueng Aceh dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun, yaitu pada musim kemarau dan pada musim penghujan. Waktu kegiatan pemantauan air sungai Krueng Aceh untuk musim kemarau dilakukan pada Mei 2008 dan pada musim penghujan dilakukan pada November 2008. Berdasarkan Tabel 3.1 lokasi sampling dilakukan di Krueng Teureubeh, Krueng Inong, Bendungan Krueng Aceh, Krueng Desa Capeung, Krueng Keumireu, Krueng Ie Alang dan Krueng Indrapuri

Tabel 3.1 Lokasi Sampling Pemantauan Kualitas Air

No.	Lokasi Sampling	Titik Koordinat (GPS)	
		Utara	Timur
1.	Krueng Teureubeh	05.29907°	095.58393°
2.	Krueng Inong	05.36589°	095.57126°
3.	Bendungan Krueng Aceh	05.37032°	095.56357°
4.	Krueng Desa Capeung	05.37216°	095.53855°
5.	Krueng Keumireu	05.39627°	095.49100°
6.	Krueng Ie Alang	05.40323°	095.49162°
7.	Krueng Indrapuri	05.24806°	095.26774°

Tabel 3.2 Hasil Uji Kualitas Air Sungai pada Musim Kemarau

No.	Parameter	Baku Mutu	Titik Sampling						
			I	II	III	IV	V	VI	VII
1.	Warna Air		Jernih	Jernih	Keruh	Keruh	Keruh	Keruh	Keruh
2.	Bau Air		-	-	-	-	-		
3.	Debit Air		0	0	0	0	0.4	0	0
4.	Temperatur	Dec 3°C	29.3	28	29.5	29	29.5	29.1	29.9
5.	pH	6-9	7.49	8.01	7.8	8.01	7.8	8.01	8.0
6.	Turbidity		2.45	8.61	12.6	11.21	10.1	15.5	20.6
7.	DHL	∞s	101.2	102.0	102.0	200.6	201.2	95.0	100.5
8.	TDS	1000 mg/L	42.70	82.0	26.6	29.2	93.6	30.4	95.0
9.	TSS	20 mg/L	1.02	20.4	26.4	12.0	25.6	1.07	79.6
10.	BOD-5	3 mg/L	1.20	0.01	1.0	0.02	2.01	1.78	3.063
11.	COD	25 mg/L	*	0.00	*	95.7	0.001	*	79.6
12.	NO ₂ -N	0.05 mg/L	0.002	0.01	0.005	0.005	0.009	0.001	0.20
13.	NO ₃ -N	10 mg/L	0.01	0.001	0.002	0.01	0.02	0.002	0.01
14.	PO ₄	0.2 mg/L	0.001	0.002	0.02	0.42	0.21	0.003	0.90
15.	Alkalinitas		216.2	79.0	82.3	100.2	106.1	112.5	79.8
16.	CaCO ₃		102.2	28.0	93.0	20.0	30.4	0.01	80.0
17.	NH ₃ -N	< 0.02 mg/L	0.01	0.05	0.01	0.02	0.21	0.01	0.01

Keterangan :

- I : Krueng Teureubeh
- II : Krueng Long
- III : Bendungan Krueng Aceh
- IV : Krueng Desa Capeung
- V : Krueng Keumireu
- VI : Krueng Ie Alang
- VII : Krueng Indrapuri

* di bawah limit deteksi

Tabel 3.3 Hasil Uji Kualitas Air Sungai pada Musim Penghujan

No.	Parameter	Baku Mutu	Titik Sampling						
			I	II	III	IV	V	VI	VII
1.	Warna Air		Jernih	Jernih	Keruh	Keruh	Keruh	Keruh	Keruh
2.	Bau Air		-	-	-	-	-	+	+
3.	Debit Air		3.9	1.9	0	0	1.3	0	0
4.	Temperatur	Dev 3°C	26	29	28	28.5	29	28.7	29.7
5.	pH	6-9	7.39	8.85	6.37	7.03	6.65	6.63	6.61
6.	Turbidity		3.95	7.70	17.34	8.23	12.97	25.1	40.3
7.	DHL	∞s	124.7	107.1	207.0	279.0	139.7	120.7	225.0
8.	TDS	1000 mg/L	55.90	95.6	94.50	104.3	63.20	59.7	102.9
9.	TSS	20 mg/L	2.00	50.4	46.0	8.00	26.0	0.002	74.0
10.	BOD-5	3 mg/L	1.79	1.02	2.06	0.92	1.05	1.98	2.70
11.	COD	25 mg/L	*	*	*	86.98	*	*	195.25
12.	NO ₂ -N	0.05 mg/L	0.005	0.001	0.004	0.006	0.006	0.005	0.007
13.	NO ₃ -N	10 mg/L	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.02
14.	PO ₄	0.2 mg/L	0.1	0.1	0.12	0.11	0.18	0.08	0.15
15.	Alkalinitas		93.0	92.9	93.8	93.60	64.40	95.0	93.60
16.	CaCO ₃		166.0	95.0	100.0	42.0	40.00	101.2	90.00
17.	NH ₃ -N	<0.05 mg/L	0.21	0.01	0.06	0.07	0.10	0.001	0.17

Catatan : * Di bawah limit deteksi

Warna air di alam sangat bervariasi, namun air sungai biasanya berwarna kuning kecoklatan karena mengandung lumpur. Warna air yang tidak normal biasanya menunjukkan adanya polusi. Warna air sungai Krueng Aceh yang dipantau masih berwarna normal. Diantaranya ada yang berwarna jernih seperti terlihat pada Krueng Teureubeh dan Krueng Inong yang merupakan daerah hulu. Sedangkan untuk daerah hilir, air berwarna keruh. Hal ini mungkin disebabkan karena banyaknya galian golongan C di beberapa titik di daerah aliran sungai. Sedangkan pada musim penghujan, hal ini mungkin disebabkan karena adanya erosi tanah yang terbawa oleh hujan.

Bau air tergantung dari sumbernya, dapat disebabkan oleh bahan-bahan kimia, ganggang, plankton atau tumbuhan dan hewan air, baik yang hidup maupun yang sudah mati. Dari hasil pemantauan dapat disimpulkan bahwa rata-rata air sungai Krueng Aceh tidak berbau kecuali pada krueng Ie Alang dan Krueng Indrapuri pada musim penghujan berbau.

Berdasarkan Tabel 3.2 dan Tabel 3.3 debit air mengalami penurunan. Hal ini salah satunya disebabkan oleh penambangan bahan galian golongan C secara besar-besaran yang mengakibatkan kerusakan parah di sepanjang daerah aliran sungai.

Hasil rata-rata pemantauan untuk temperatur yang dilakukan pada musim kemarau masih berada di bawah ambang batas baku mutu air kelas II demikian juga pada musim penghujan. Temperatur air yang tinggi akan menimbulkan beberapa akibat, diantaranya adalah menurunnya jumlah oksigen terlarut di dalam air, kecepatan reaksi kimia meningkat, terganggunya kehidupan ikan dan hewan air lainnya serta jika temperatur terlalu tinggi akan mematikan ikan dan hewan air lainnya. Temperatur air yang tinggi ditandai salah satunya adalah dengan munculnya ikan-ikan dan hewan air lainnya ke permukaan untuk mencari oksigen.

Nilai pH air yang normal adalah sekitar pH netral, yaitu 6-9. perubahan keasaman pada air, baik ke arah alkali (pH naik) maupun ke arah asam (pH turun), akan sangat mengganggu kehidupan ikan dan hewan air di sekitarnya. Air yang mempunyai pH rendah bersifat korosif terhadap baja dan sering menyebabkan pengkaratan pada pipa-pipa besi.

pH rata-rata dari hasil pemantauan untuk musim kemarau yang terlihat pada Tabel 3.2 masih berada di bawah ambang batas baku mutu air kelas II menurut PPRI No. 82 tahun 2001. Sedangkan pH rata-rata pada musim penghujan yang terlihat pada Tabel 3.3 juga masih berada di bawah ambang batas baku mutu air kelas II.

Total Dissolved Suspended (TDS) adalah padatan-padatan yang lebih kecil dari pada padatan tersuspensi. Padatan ini terdiri dari senyawa-senyawa anorganik dan organik yang larut dalam air, mineral dan garam-garamnya. Berdasarkan PPRI No. 82 Tahun 2001, baku mutu TDS yang diperbolehkan untuk kualitas air kelas II sebesar 1000 mg/L. Hasil pemantauan pada musim kemarau rata-rata masih berada di bawah ambang batas baku mutu air kelas II, demikian juga pada musim penghujan.

Total Solid Suspended (TSS) adalah jumlah zat padat yang tersuspensi dalam air. Padatan tersuspensi terdiri dari partikel-partikel yang ukuran maupun beratnya lebih kecil dari pada sedimen, misalnya tanah liat, bahan organik tertentu, sel-sel mikroorganisme dan lain sebagainya. Padatan tersuspensi dalam air akan mengurangi penetrasi cahaya ke dalam air sehingga mempengaruhi regenerasi oksigen.

Berdasarkan Tabel 3.2 terlihat bahwa pada Bendungan Krueng Aceh, Krueng Keumireu dan Krueng Indrapuri nilai TSS telah melewati ambang batas baku mutu air kelas II. Dimana baku mutu air kelas II yang ditetapkan oleh PPRI No. 82 tahun 2001 adalah 20 mg/L. Sedangkan pada musim penghujan Krueng Inong, Bendungan Krueng Aceh dan Krueng Indrapuri nilai TSS telah melewati ambang batas baku mutu air kelas II seperti yang terlihat pada Tabel 3.3.

BOD (*Biological Oxygen Demand*) adalah banyaknya oksigen dalam milligram per liter yang diperlukan untuk menguraikan materi organik oleh bakteri. Untuk itu diperlukan waktu 100 hari pada temperatur 20°C akan tetapi di laboratorium dipergunakan waktu 5 hari sehingga dikenal dengan nama BOD-5. Hasil pemantauan pada musim kemarau masih berada di bawah ambang batas baku mutu air kelas II kecuali untuk Krueng Indrapuri sebesar 3.003 mg/L. Hal ini mungkin disebabkan oleh limbah buangan rumah tangga dari penduduk sekitar sungai. Sedangkan untuk musim penghujan nilai BOD masih di bawah ambang batas baku mutu.

Chemical Oxygen Demand (COD) adalah banyaknya oksigen dalam milligram per liter yang dibutuhkan dalam kondisi khusus untuk menguraikan materi organik secara kimiawi. Berdasarkan Tabel 3.2 terlihat bahwa pada Krueng Teureubeh, Bendungan Krueng Aceh dan Krueng Ie Alang nilai COD tidak terdeteksi, artinya nilai ini sangat kecil sekali. Sedangkan pada Krueng Inong dan Krueng Kemireu, nilai COD masih di bawah ambang batas baku mutu air kelas II. Namun, pada Krueng Desa Capeung dan Krueng Indrapuri nilai COD malabahi ambang batas baku mutu. Untuk musim penghujan, nilai COD rata-rata tidak terdeteksi kecuali pada Krueng Desa Capeung dan Krueng Indrapuri. Hal ini mungkin disebabkan karena banyaknya senyawa organik dalam limbah buangan yang masuk ke dalam kedua sungai tersebut.

Berdasarkan Tabel 3.3 terlihat bahwa kandungan nitrit (NO_2) dalam air sungai masih berada di bawah ambang batas baku mutu air kelas II, demikian juga pada Tabel 3.2 kecuali pada Krueng Indrapuri. Hal ini mungkin disebabkan adanya pengotoran dari

lahan pertanian. Kandungan nitrat (NO_3) berdasarkan hasil pemantauan masih berada dibawah ambang batas baku mutu.

Amoniak (NH_3) merupakan hasil penguraian (pembusukan) protein tanaman atau hewan atau dalam kotoran hewan. Berdasarkan hasil pemantauan pada musim kemarau rata-rata masih di bawah ambang batas baku mutu air kelas II, kecuali pada Krueng Inong, dan Krueng Kemireu. Sedangkan pada musim penghujan kandungan amoniak yang berada di bawah ambang batas baku mutu air kelas II hanya pada Krueng Inong dan Krueng Desa Capeung, sedangkan yang lainnya melewati ambang batas baku mutu yang diperbolehkan. Hal ini mungkin disebabkan oleh masuknya kotoran hewan, pupuk yang mengandung amoniak maupun urine yang terurai di dalam air.

Alkalinitas sering dihubungkan dengan kesadahan air. Hal ini disebabkan oleh ion-ion Mg^{2+} dan Ca^{2+} yang terdapat dalam air. Air yang berkualitas baik harus memiliki kesadahan yang rendah. Karena air sadah dapat bereaksi dengan sabun sehingga sabun tidak berbusa, dan jika dipanaskan akan timbul kerak/mengendap di dasar wadah. Demikian juga dengan kandungan CaCO_3 dalam air akan menimbulkan pengendapan di dalam ketel atau bak penampungan air. Hasil pemantauan menunjukkan alkalinitas dan kandungan CaCO_3 dalam air sungai masih berada di bawah ambang batas baku mutu air.

Hasil pemantauan kualitas air pada musim kemarau menunjukkan kandungan fosfat (PO_4) rata-rata masih berada di bawah ambang batas kecuali pada Krueng Desa Capeung dan Krueng Kemireu. Banyaknya kandungan fosfat ini mungkin dikarenakan oleh masuknya kotoran, sisa pertanian dan penggunaan deterjen yang mengandung fosfat. Sedangkan berdasarkan hasil pemantauan pada musim penghujan terlihat bahwa kandungan fosfat masih berada di bawah ambang batas baku mutu air kelas II.

Tabel 3.4 Kerangka *Pressure, State, Response* (PSR) untuk Pemasalahan DAS Krueng Aceh

No.	Pressure	State	Response
1.	DAS Krueng Aceh pada tahun 80-an telah dilakukan normalisasi pelurusan Mendell	Untuk mengatasi banjir tahunan terutama untuk Kabupaten Aceh Besar dan Kota Madya Banda Aceh.	Secara potensi DAS Krueng Aceh tidak dijadikan lagi tempat untuk kegiatan penambangan bahan galian golongan C.
2.	Mempertahankan kelestarian DAS Krueng Aceh.	Telah dilakukan penetapan daerah larang tambang di sepanjang DAS Krueng Aceh.	Untuk lokasi penambangan DAS Krueng Aceh, hanya pada kawasan tertentu saja. Serta adanya system penambangan rakyat dengan tidak menggunakan alat berat.
3.	Pemenuhan kebutuhan material bahan galian golongan C pada kegiatan rehabilitasi dan reklamasi di NAD telah dilakukan eksploitasi secara besar-besaran dan tidak terkendali di sepanjang DAS Krueng Aceh.	Terdapat kerusakan, abrasi dan erosi di sepanjang DAS Krueng Aceh sehingga akan mengancam kelestarian DAS Krueng Aceh dan lingkungan sekitarnya.	Harus segera dilakukan penertiban penambangan yang tidak terkendali di sepanjang DAS Krueng Aceh terutama pada penambangan di daerah larang tambang dan yang menggunakan alat berat.

BAB IV LAHAN DAN HUTAN

4.1 Lahan

Tanah sebagai salah satu komponen lahan, bagian dari ruang daratan dan lingkungan hidup dalam wilayah Republik Indonesia. Tanah memiliki banyak fungsi dalam kehidupan. Di samping sebagai ruang hidup, tanah memiliki fungsi produksi, diantaranya sebagai penghasil biomassa, seperti bahan makanan, serat kayu dan bahan obat-obatan. Selain itu tanah juga berperan dalam menjaga kelestarian sumber daya air dan lingkungan secara umum. Oleh karena itu tanah harus dijaga kelestariannya.

Indonesia adalah Negara agraris dengan sebagian besar penduduknya bergantung pada sektor pertanian. Pemanfaatan tanah tidak dapat dipisahkan dari kegiatan yang dilakukan oleh orang pada hamparan lahan yang ditempatinya dan lingkungan hidup. Dengan demikian pemanfaatan tersebut berkaitan dengan pemanfaatan ruang kawasan dan pengelolaan lingkungan hidup yang pokok-pokok pengaturannya ditetapkan sebelumnya dalam Undang-undang No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang dan Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Tanah merupakan sumber daya alam yang mengandung benda organik dan anorganik yang mampu mendukung pertumbuhan tanaman. Sebagai faktor produksi pertanian, tanah mengandung unsur hara dan air yang perlu ditambah untuk pengganti yang lebih dipakai. Total lahan pada Kabupaten Aceh Besar sebesar 291.275 Ha, meliputi lahan untuk kehutanan, kebun, ladang, tambak dan kolam. Lahan kebun pada Kabupaten Aceh Besar seluas 48.569 Ha dan ladang sebesar 16.733 Ha.

Pencemaran tanah dapat terjadi karena penggunaan pestisida atau insektisida pada pertanian. Pembuangan limbah yang tidak dapat terurai juga dapat merusak komposisi tanah. Selain itu deterjen yang tersisa dan tidak dapat terurai juga akan mencemari tanah.

4.2 Hutan

Sumber daya hutan merupakan salah satu kekayaan alam yang sangat besar kontribusinya bagi pembangunan Indonesia. Pemanfaatan yang tidak disertai dengan pengelolaan yang baik menyebabkan sumber daya hutan rusak permanen. Kerusakan lahan diindikasikan dengan penurunan luas kawasan bervegetasi, meningkatnya tingkat erosi dan sedimentasi dapat terjadi di kawasan hutan maupun luar kawasan hutan.

Potensi sumber daya hutan yang ada di wilayah Kabupaten Aceh Besar meliputi kawasan hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi. Hutan lindung di Kabupaten Aceh Besar memiliki luas 60.944 Ha, Hutan Produksi seluas 8,77 Ha dan kawasan konservasi seluas 23. 970 Ha. Kawasan konservasi terbagi 2 (dua) yaitu kawasan konservasi in-situ dan kawasan konservasi ex-situ.

Kawasan konservasi in-situ adalah kawasan yang melindungi ekosistem atau habitat alami untuk konservasi kekayaan keanekaragaman hayati. Kawasan konservasi in-situ dalam Kabupaten Aceh Besar meliputi Cagar Alam di Kota Jantho seluas 16.640 Ha, Taman Hutan Rakyat (Tahura) di Seulawah seluas 6.030 Ha dan Kebun Plasma Nutfah di Lhoong seluas 1.300 Ha. Masalah permasalahan disini adalah terjadinya perambahan hutan dan lahan oleh masyarakat untuk perkebunan dan lading berpindah yang mengakibatkan rusaknya kawasan hutan.

Kawasan konservasi ex-situ adalah konservasi sumber daya alam di luar kawasan yang pembangunannya diupayakan sesuai dengan aslinya, sehingga memungkinkan dilakukan pengembangan dan pembinaan sumber daya alam beserta ekosistemnya untuk berbagai tujuan. Kawasan konservasi ex-situ dalam Kabupaten Aceh Besar kawasan konservasi ex-situ belum terkelola dan belum adanya peraturan yang jelas.

Kawasan hutan lindung dalam Kabupaten Aceh Besar menyebar di beberapa kecamatan dengan luas seluruhnya 60.944 Ha. Permasalahan hutan lindung di Kabupaten Aceh Besar diantaranya adalah perambahan hutan dan fungsi hutan yang menurun.

Kerusakan hutan di Kabupaten Aceh Besar tergolong berat, antara lain terjadi pada kawasan hutan Lhoong di daerah Goh Pancasila (Lam Sujen), di Kecamatan Jantho, Kecamatan Cot Glee (Siron), Lembah Seulawah (Desa Panca), Taman Hutan Raya (Saree) dan Lamteuba, Kecamatan Seulimeum. Taman Hutan Industri (HTI) di Lamteuba ditebang untuk kayu bakar industri bata. Penebangan kayu secara illegal dan

perambahan hutan untuk peeladangan erat kaitannya dengan mata pencarian masyarakat sekitar kawasan hutan tersebut.

Berdasarkan data dari Dinas Kehutanan terdapat beberapa titik *Illegal Logging* di Kabupaten Aceh Besar yaitu di Lembah Seulawah, Seulimeum, Aneuk Gle, Kota Jantho, Indrapuri, Lhoknga, Leupung dan Lhoong. Namun luas kerusakan akibat *Illegal Logging* ini belum dapat teridentifikasi.

Perambahan hutan merupakan ancaman serius terhadap kelestarian hutan dan keselamatan makhluk hidup termasuk manusia. Dampak dari rusaknya hutan antara lain peningkatan sedimen sungai, banjir dan longsor. Dampak lainnya adalah terganggunya habitat makhluk hidup di dalam hutan sehingga sering di jumpai hewan-hewan hutan turun ke pemukiman penduduk.

Tabel 4.1 Kerangka PSR Pemantauan Lahan dan Hutan Kabupaten Aceh Besar

Masalah	Indikator Tekanan Lingkungan	Indikator Kondisi Lingkungan	Indikator Tanggap Sosial
Degradasi hutan sebagai penyangga kehidupan	Berkurangnya tutupan lahan	Meluasnya okupasi kawasan hutan oleh berbagai pihak	Larangan penebangan hutan
	Berkurangnya luas kawasan hutan	Seringnya satwa liar masuk ke wilayah perkebunan dan pemukiman penduduk	Melakukan tindakan persuasive terhadap penggunaan kawasan hutan yang berfungsi sebagai habitat satwa

BAB V REKOMENDASI

Dari permasalahan yang timbul di daerah Kabupaten Aceh Besar, Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Aceh Besar merekomendasikan :

1. Melakukan penertiban penambangan bahan galian golongan C di sepanjang Daerah Aliran Sungai.
2. Memberikan sanksi tegas terhadap penambangan galian golongan C yang dilakukan secara liar/ non izin.
3. Melakukan rehabilitasi Daerah Aliran Sungai yang rusak.
4. Melakukan penghijauan kembali terhadap lahan kritis.
5. Meningkatkan pengamanan hutan, menindak tegas pelaku *Illegal Logging*, melakukan penyuluhan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian hutan lindung serta menjaga kelestarian kawasan konservasi.
6. Melakukan penyuluhan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sekitar dan meningkatkan sarana dan prasarana kebersihan.
7. Melakukan rehabilitasi hutan mangrove dan terumbu karang yang rusak akibat Tsunami dan pengebumahan.

SUMBER DATA

Badan Meteorologi dan Geofisika Blang Bintang, Data Curah Hujan Kabupaten Aceh Besar dan Sekitarnya

Dinas Kehutanan Kabupaten Aceh Besar, 2008, Sumber Daya Hutan dan Lahan.

Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Besar, 2008, Data Fisik Puskesmas Tahun 2008.

Dinas Kimpraswil Kabupaten Aceh Besar, 2008, Sumber Daya Air

Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Aceh Besar, 2008, Ekosistem Pesisir dan Laut yang Ada di Wilayah Aceh Besar.

Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Aceh Besar, 2008, Hasil Uji Pemantauan Kualitas Air.

Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Besar, 2008, Industri Rumah Tangga Menengah dan Besar.

Kantor Perhubungan Kabupaten Aceh Besar, 2008, Sarana Transportasi di Kabupaten Aceh Besar.

DAFTAR PUSTAKA

- _____, 2007, Laporan Periodik Volume Sampah Harian Kabupaten Aceh Besar, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, Kota Jantho.
- _____, 2007, Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Aceh Besar, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, Kota Jantho.
- _____, 2007, Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Pemerintah Provinsi NAD, Banda Aceh.
- Fardiaz, S, 1992, Polusi Air dan Udara, Kanisius, Yogyakarta.
- Zuliani, R, 2006, Proses Pengolahan Limbah Cair Platina dari Awal sampai Akhir, Jurusan Kimia Fakultas MIPA, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.
- Sastrawijaya, T, 2000, Pencemaran Lingkungan, Kinemka Cipta, Jakarta

PDF Create! 2 Trial
www.scansoft.com

Lampiran 1

Data Fisik Puskesmas Tahun 2008

No.	Puskesmas	Luas (m ²)		Kondisi Bangunan		
		Tanah	Bangunan	Baik	R. Ringan	R. Berat
1.	Lhoong					-
2.	Leupung					-
3.	Lhoknga	33125	3000	Baik	-	-
4.	Peukan Bada	1624	1568	Baik	-	-
5.	Darul Imarah			-	R. Ringan	-
6.	Darul Kamal	356	3300	Baik	-	-
7.	Simpang Tiga	384	1440	-	R. Ringan	-
8.	Suka Makmur	282	700	Baik	-	-
9.	Kuta Malaka			Baik	-	-
10.	Indrapuri	624	450	Baik	-	-
11.	Kuta Cot Glie	1251		Baik	-	-
12.	Seulimeum	312	2520	Baik	-	-
13.	Lamteuba	442	320	-	R. Ringan	-
14.	Lembah Seulawah					-
15.	Montasik	1500	1500	Baik	-	-
16.	Ingin Jaya			-	R. Ringan	-

17.	Blang Bintang			Baik	-	-
18.	Kuta Baru		825	Baik	-	-
19.	Darussalam	1750	430	Baik	-	-
20.	Kr. Barona Jaya	1000	3000	-	Perumahan	-
21.	Baitussalam	1575	325	Baik	-	-
22.	Mesjid Raya			Baik	-	-
23.	Kota Jantho					-
24.	Pulo Aceh			Baik	-	-
25.	Lampisang			Baik	-	-

Lampiran 2

Sumber Air

Potensi Sumber Air yang ada di Wilayah Kabupaten Aceh Besar

a. Mata Air

No.	Nama/ Lokasi	Debit Air (m ³ / detik)	Permasalahan	Upaya Konservasi
1.	Mata Ie Nebit	8000	Debit Air	Penghijauan
2.	Japakeh	48000	Debit Air	Penghijauan
3.	Empe Bling	15000	Debit Air	Penghijauan

b. Danau/ Waduk/ Situ/ Embung

No.	Nama/ Lokasi	Luas (Ha)	Volume (m ³)	Permasalahan	Upaya Konservasi
1.	Blangkaram	10	250000	Debit Air	Penghijauan
2.	Kr. Lubuk	6	105000	Debit Air	Penghijauan
3.	Keuliling	65	975000	Debit Air	Penghijauan

Lampiran 3

SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT

Ekosistem pesisir dan laut yang ada di wilayah Kabupaten Aceh Besar

No.	Ekosistem	Lokasi	Luas	Permasalahan	Upaya Konservasi
1.	Terumbu Karang	1. Kec. Pulo Aceh 2. Kec. Lhoknga 3. Kec. Leupung 4. Kec. Lhoong	1300 Ha 750 Ha 557 Ha 437 Ha	Hancur akibat pengeboman	Perlu direhabilitasi kembali, yaitu terumbu karang buatan
2.	Mangrove	1. Kec. Mesjid Raya 2. Kec. Baitussalam 3. Kec. Lhoong 4. Kec. Pekan Bada	375 Ha 227 Ha 60 Ha 57 Ha	Hancur akibat Tsunami	Perlu direhabilitasi kembali atau penanaman
3.	Padang Lamun	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

Lampiran 4

SUMBER DAYA HUTAN DAN LAHAN

Potensi Sumber Daya Hutan yang Ada di Wilayah Kabupaten Aceh Besar

a. Kawasan Konservasi (in-Situ)

No.	Nama	Lokasi	Luas (Ha)	Permasalahan
1.	Cagar Alam	Jantho	16640	Perambahan Hutan
2.	Tahura	Seulawah	6030	Perambahan Hutan
3.	Kebun Plasma Nutfah	Lhoong	1300	Batas dan Pengelolaan belum jelas

b. Hutan Lindung

No.	Nama	Lokasi	Luas (Ha)	Permasalahan	Pengelola
1.	Hutan Lindung	Menyebarkan	60944	Perambahan Hutan dan Pungutan yang terus menurun	Dinas Kehutanan Aceh Besar

c. Hutan Produksi

No.	Klasifikasi	Luas	Produksi (m ³ , log, ton, dll)	Permasalahan
3.	Hutan Rakyat	3,77	857,94 m ³	Dana untuk Pengembangan Hutan Rakyat masih kurang

d. Illegal Logging

No.	Lokasi	Luas Kerusakan	Upaya Penanggulangan
1.	Lembah Seulawah	Belum Teridentifikasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pengamanan Hutan - Penyuluhan Masyarakat - Pembentukan Tim Siaga - Meningkatkan Kerjasama dengan masyarakat dan unsur terkait
2.	Seulimeum	Belum Teridentifikasi	
3.	Aneuk Gle	Belum Teridentifikasi	
4.	Kota Jantho	Belum Teridentifikasi	
5.	Indrapuri	Belum Teridentifikasi	
6.	Lhoknga	Belum Teridentifikasi	
7.	Leupung	Belum Teridentifikasi	
8.	Lhoong	Belum Teridentifikasi	

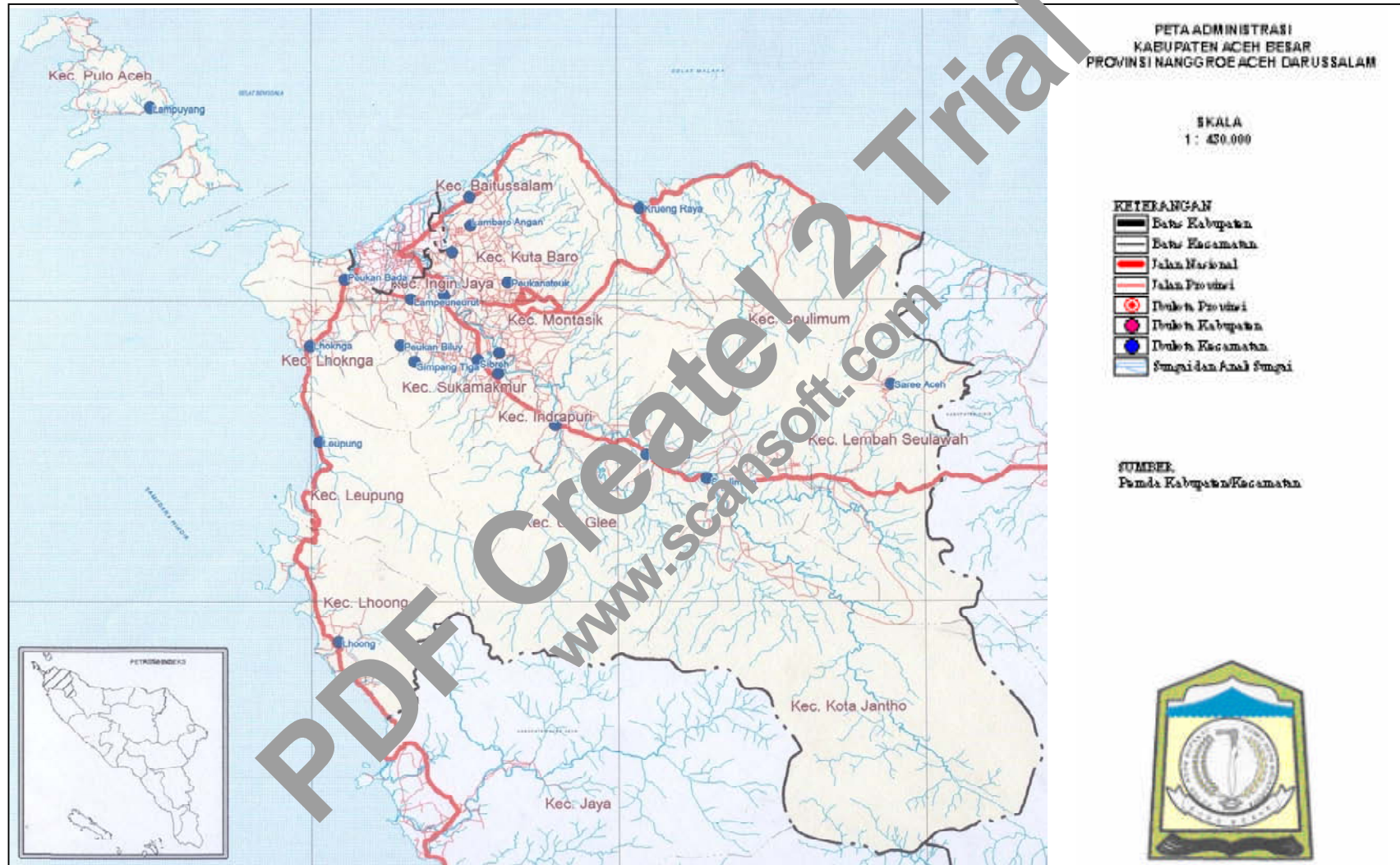
PDF Create! 2 Trial
www.scansoft.com

Lampiran 5

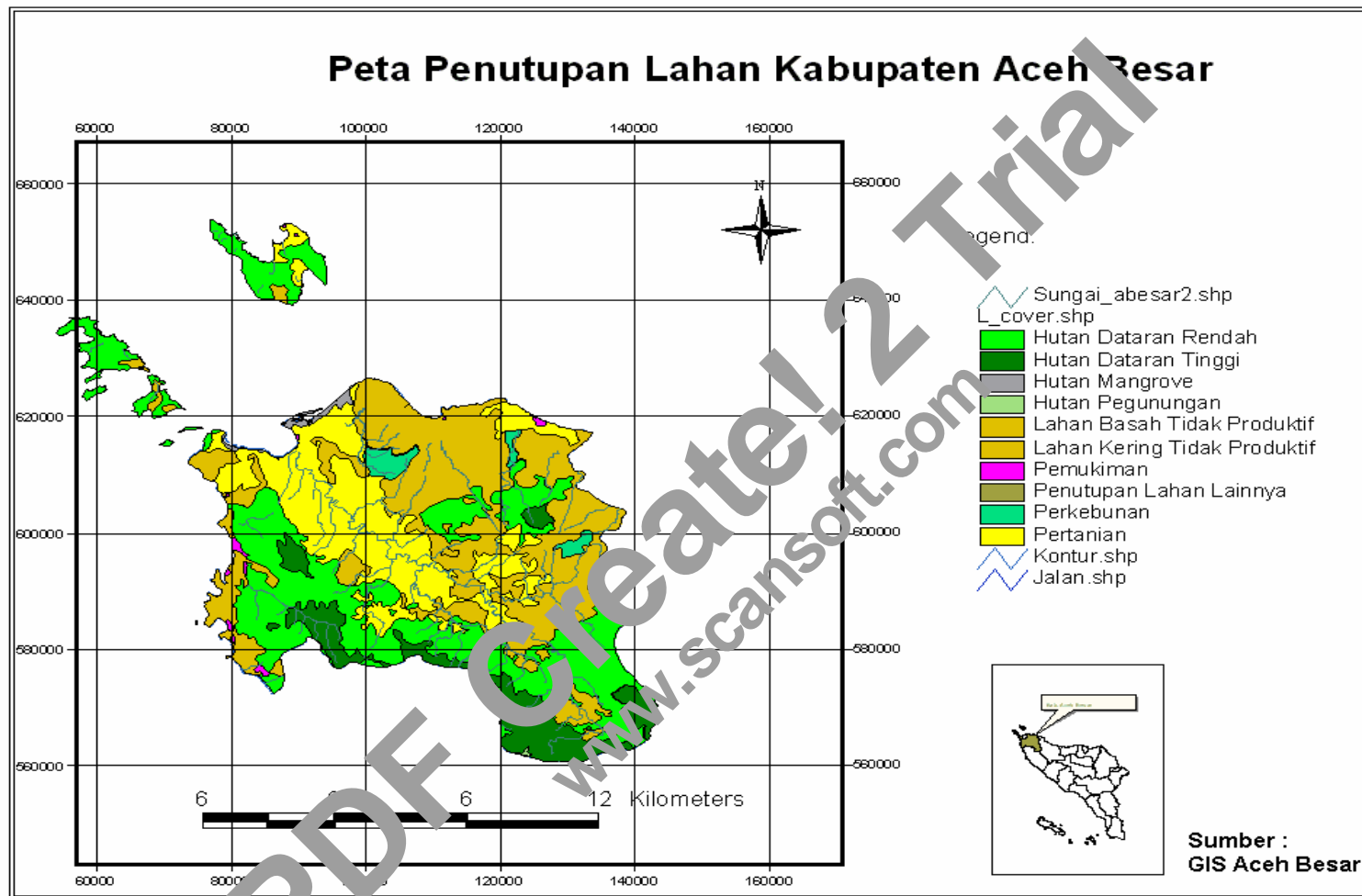
Data Curah Hujan Kabupaten Aceh Besar dan Sekitarnya
Tahun 2007-2008

No.	Bulan	Curah Hujan (MM)	Hari Hujan (HH)
1.	Oktober	125.5	17
2.	November	179.7	18
3.	Desember	152.5	10
4.	Januari	160.9	16
5.	Februari	23.7	6
6.	Maret	162.1	15
7.	April	86.4	17
8.	Mei	62.3	13
9.	Juni	18.4	8
10.	Juli	49.1	11
11.	Agustus	53.2	14
12.	September	69.3	9
13.	Oktober	92.3	16

Lampiran 6



Lampiran 7



30

Lampiran 8

Foto-foto kerusakan Daerah Aliran Sungai







Lampiran 9

Foto-Foto Pemantauan Kualitas Air









Lampiran 10

Foto Kerusakan Pesisir





PDF Create! 2 Trial
www.scansoft.com